

**ANALISIS PINJAMAN DAERAH
SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Dwiyono

NIM : 032114144

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2009**

**ANALISIS PINJAMAN DAERAH
SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Dwiyono

NIM : 032114144

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2009**

SKRIPSI

**ANALISIS PINJAMAN DAERAH
SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman**

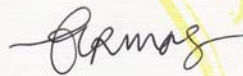
Oleh :

Dwiyono

NIM : 032114144

Telah Disetujui Oleh :

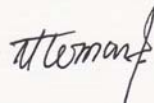
Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA.

Tanggal : 10 juli 2009

Pembimbing II



M. Th. Ernawati, S.E., M.A.

Tanggal : 21 - 08 - 2009

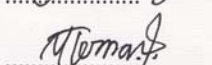
SKRIPSI
ANALISIS PINJAMAN DAERAH
SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Dwiyono
NIM: 032114144

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 30 September 2009
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris Lisia Apriani, S.E., M.Si, Akt., QIA.	
Anggota Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA.	
Anggota M. Th. Ernawati, S.E., M.A.	
Anggota Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	


Yogyakarta, 30 September 2009

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan




Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.

MOTTO dan PERSEMBAHAN

“HIDUP ADALAH KESEMPATAN”

Jalani.....dan *do the best*. “Talk Less Do more”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ◆ Yesus Kristus Sang juru Selamat
- ◆ Bapak, Ibu, Mas Danang, Sinyo
- ◆ Mbah Akad (Alm), Mbah Mak, Bulek Kus, Om Slamet ”Awah”, Bulek Sul, Om Giggs, Tante Linda, Om Co, Tante Kun, Om Pitut, Dodo, Nonik, Dek Nana, Dek Sari, Dek Lala, Dek Santoso, Mbak Pur, Mak Ti (Alm), De’Luwi, Pak Juli (Hotel Slamet Pare-Kediri)
- ◆ Prana Djati Ningrum
- ◆ Teman-teman akuntansi angkatan 2003, komunitas kontrakan (Pathuk), teman-teman akuntansi angkatan 2008, komunitas kost “Rajawali”, teman-teman Mudika Paroki Santo Mateus Pare-Kediri
- ◆ Seluruh pecinta Internazionale Milano (Internisti) dan Persik Kediri (Persikmania)

Terima kasih untuk kebersamaan yang sangat berarti dalam hidup.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Dwiyono

Nomor Mahasiswa : 032114144

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Pinjaman Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah. Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 30 September 2009

Yang menyatakan


(Dwiyono)



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **ANALISIS PINJAMAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman)** dan dimajukan untuk diuji pada tanggal: 30 September 2009 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan, menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 21 Agustus 2009
Yang membuat pernyataan,

Dwiyono

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Selama penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun demikian hambatan dan kesulitan itu dapat teratasi berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- a. Romo Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotama, SJ. Selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- b. Bapak Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- c. Bapak Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- d. Ibu Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA., selaku Pembimbing I yang bersedia membimbing dan meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan dan saran selama penulisan skripsi.

- e. Ibu M. Th. Ernawati, S.E., M.A., selaku Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, saran serta arahan dalam penulisan skripsi ini, juga atas waktu yang disediakan.
- f. Bapak Suroto, Ka BPKKD beserta staf, Ka BAPPEDA serta seluruh pihak Pemerintah Kabupaten Sleman atas ijin yang diberikan dan atas segala bantuan selama penelitian ini dilaksanakan.
- g. Bapak Ignatius Warmo, Ibu E. Katinah, Paulus Wardhana S.Pd., Yansen Triyono Sarjana sebagai orang tua, kakak, adik yang telah memberikan begitu banyak dukungan material dan spiritual selama proses kehidupan penulis khususnya ketika kuliah.
- h. Keluarga besar penulis di Kediri (Hotel Slamet Pare-Kediri) dan di Yogyakarta, terima kasih atas segala dukungannya.
- i. Keluarga Bapak Daru Jati Yuwono di Notoyudan Yogyakarta, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan.
- j. Prana Djati Ningrum atas doa, cinta, dukungan dan perhatian yang tiada henti hingga selesainya skripsi ini.
- k. Teman-teman akuntansi angkatan 2003, komunitas kontrakan (Pathuk), teman-teman akuntansi angkatan 2008, komunitas kost “Rajawali”, teman-teman Mudika Paroki Santo Mateus Pare-Kediri serta semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas persahabatannya.
- l. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca yang berminat dan dapat juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang dapat memberikan manfaat bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, Agustus 2009



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Otonomi Daerah.....	6
B. Hak dan Kewajiban Daerah.....	6
C. Pendapatan Asli Daerah.....	8
D. Dana Perimbangan.....	8
E. Belanja Daerah.....	9
F. Pinjaman Daerah.....	11
G. <i>Debt Service Coverage Ratio</i>	16
H. Anggaran Sektor Publik.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	20

	B. Tempat dan Waktu Penelitian	20
	C. Subjek dan Objek Penelitian	20
	D. Data yang dibutuhkan.....	20
	E. Teknik Pengumpulan Data	21
	F. Teknik Analisis Data	21
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
	A. Sejarah Pembentukan.....	24
	B. Geografis dan Luas Wilayah.....	27
	C. Kependudukan.....	27
	D. Perekonomian Daerah.....	28
	E. Pertumbuhan Ekonomi.....	28
	F. Inflasi.....	29
	G. Investasi.....	29
	H. Pertanian.....	30
	I. Industri.....	32
BAB V	ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN	
	A. Persamaan Trend.....	33
	B. Proyeksi PAD, DBH, DAU, BW.....	36
	C. Proyeksi angsuran pokok dan bunga.....	37
	D. <i>Debt Service Coverage Ratio</i>	40
	E. Pembahasan.....	40
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	42
	B. Keterbatasan	42
	C. Saran	43
	DAFTAR PUSTAKA	44
	LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1	33
Tabel 5.2	34
Tabel 5.3	35
Tabel 5.4	35
Tabel 5.5	38
Tabel 5.6	38
Tabel 5.7	40
Tabel 5.8	40

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Surat Ijin Penelitian.....	46
Laporan Realisasi APBD Tahun 2001	47
Laporan Realisasi APBD Tahun 2002	48
Laporan Realisasi APBD Tahun 2003	49
Laporan Realisasi APBD Tahun 2004	50
Laporan Realisasi APBD Tahun 2005	51
Laporan Realisasi APBD Tahun 2006	52
Laporan Realisasi APBD Tahun 2007	53

ABSTRAK

ANALISIS PINJAMAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman

Dwiyono
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2009

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Sleman telah memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman jangka panjang yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah.

Penelitian studi kasus ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juli 2009. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah : *Debt Service Coverage Ratio* dengan menggunakan metode *Least Square* untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Wajib.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman layak untuk memperoleh pinjaman daerah sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam PP Nomor 54 Tahun 2005 yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF REGIONAL LOAN AS ONE OF THE ALTERNATIVES OF REGIONAL DEVELOPMENT FINANCING A Case Study at Regency Government of Sleman

Dwiyono
SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2009

This research had a purpose to know whether Regency Government Sleman fulfilled the condition to secure the long-term loan that was used in financing the development according to the Government Regulation No.54 in 2005 about the regional loan.

This Case study research was carried out in April until July 2009. The data were gathered using documentation technique. The data analysis technique used Debt Service Coverage Ratio by using Least Square Method to predict the regional original income, General Allocation Fund, Revenue sharing fund and obligatory.

The Result of the research showed that Regency Government of Sleman was feasible to secure the regional loan in line with the condition that was determined in Government Regulation No.54 in 2005 that could be used for regional development financing and to increase the society's welfare.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, beberapa daerah mengalami masalah keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembangunan daerah sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah Daerah senantiasa menyediakan anggaran untuk pembangunan daerah, tetapi karena keterbatasan penerimaan daerah maka perlu dicari sumber-sumber yang lain. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah keuangan adalah dengan melakukan pinjaman daerah.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 dan telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (Santoso, 2003: 148). Pinjaman ini dapat bersumber dari dalam seperti pemerintah pusat, lembaga keuangan bank dan bukan bank, masyarakat, maupun pinjaman luar negeri yang berupa pinjaman bilateral maupun multilateral.

Pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan bagi daerah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan. Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan (Santoso, 2003: 148).

Pengelolaan pinjaman daerah yang baik sangat diperlukan karena pinjaman daerah merupakan alternatif pembiayaan bagi pemerintah. Pengelolaan pinjaman sangat dipengaruhi berbagai hal seperti fluktuasi belanja daerah. Pada umumnya alokasi belanja daerah akan mengikuti besarnya penerimaan daerah, penerimaan daerah sendiri pada era otonomi masih bergantung pada dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Beberapa Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan pembiayaan dari potensi sendiri, terutama dari Pendapatan Asli Daerah maupun sumber daya alam. Potensi pembiayaan daerah yang belum dikelola dengan baik adalah pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah. Kegiatan-kegiatan yang

dibiayai melalui pinjaman daerah merupakan investasi di bidang publik berupa perbaikan dan penambahan infrastruktur sosial ekonomi. Semakin baik infrastruktur ekonomi yang disediakan Pemerintah Daerah, diharapkan akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Di masa yang akan datang, daerah dapat memanfaatkan pinjaman untuk pembiayaan pembangunan daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah dipandang sebagai alternatif pembiayaan yang potensial bagi pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah Pemerintah Kabupaten Sleman telah memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman jangka panjang yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah?

C. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka penelitian ini hanya dibatasi pada tahun anggaran 2001 sampai 2007.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Sleman telah memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman jangka panjang yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis.

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan teori-teori yang didapat dari perkuliahan dan sumber-sumber bacaan.

2. Bagi Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil keputusan di lingkungan pemerintah daerah dalam memperkaya kajian tentang keuangan daerah khususnya mengenai kemampuan keuangan dalam melakukan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber investasi untuk membiayai pelaksanaan pembangunan.

3. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan bacaan dan acuan pustaka, yang dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berminat akan topik ini.

F. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori

Bab ini menguraikan penjelasan atas teori-teori pendukung berkaitan dengan penelitian dan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan.

Bab III. Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan cara yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab IV. Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menjelaskan gambaran perusahaan yang diteliti meliputi sejarah perusahaan, tujuan pendirian dan struktur organisasi perusahaan.

Bab V. Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang diperoleh, analisis data dan hasil penelitian serta interpretasi. Analisis dan pembahasan didasarkan pada teori yang telah dikemukakan.

Bab VI. Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang mengemukakan kesimpulan dari hasil analisis, keterbatasan penelitian serta saran penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Daerah otonom menurut UU No. 32 Tahun 2004

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pengertian Pemerintah Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Hak dan Kewajiban Daerah

1. Hak Daerah menyelenggarakan Otonomi menurut UU no. 32 Tahun 2004
 - a. Mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.
 - b. Memilih pimpinan daerah.
 - c. Mengelola aparatur daerah.
 - d. Mengelola kekayaan daerah.

- e. Memungut pajak daerah dan pajak daerah.
 - f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
 - g. Mendapatkan sumber-sumber lain yang sah.
 - h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Kewajiban Daerah menyelenggarakan Otonomi menurut UU no. 32 Tahun 2004
- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
 - d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
 - e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
 - f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
 - g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
 - h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
 - i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
 - j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
 - k. Melestarikan lingkungan hidup.
 - l. Mengelola administrasi kependudukan.
 - m. Melestarikan nilai sosial budaya.

- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

D. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah pendanaan daerah yang bersumber dari dana APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) (Mahsun dkk, 2006: 39). Dana perimbangan digunakan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah.

Dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai kegiatan khusus di daerah yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu (Mahsun dkk, 2006: 39-40).

E. Belanja Daerah

Menurut Halim (2004: 242-243) belanja daerah meliputi:

1. Belanja Rutin

Belanja rutin adalah pengeluaran yang masa manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset kekayaan bagi daerah.

Belanja rutin meliputi:

a. Belanja administrasi umum terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang

3) Belanja Perjalanan Dinas

4) Belanja Pemeliharaan

5) Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana umum

b. Belanja Investasi

Belanja investasi adalah pengeluaran yang masa manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Belanja investasi terdiri dari:

1) Belanja Publik

Belanja publik adalah belanja yang masa manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.

2) Belanja Aparatur

Belanja aparatur adalah belanja yang masa manfaatnya tidak secara langsung oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang.

c. Pengeluaran Transfer

Pengeluaran tranfer adalah pengalihan utang pemerintah daerah dengan kriteria:

1) Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.

- 2) Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang seperti pada suatu pinjaman.
 - 3) Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti yang diharapkan pada investasi.
- d. Pengeluaran Tidak Tersangka
- Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran yang disediakan untuk pembiayaan:
- 1) Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
 - 2) Tagihan tahun lalu yang belum diselesaikan dan atau tidak tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
 - 3) Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan).

F. Pinjaman Daerah

1. Pengertian Pinjaman Daerah

Pengertian pinjaman daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

2. Jenis Pinjaman Daerah

Jenis pinjaman daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- b. Pinjaman jangka menengah, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.
- c. Pinjaman jangka panjang, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

3. Sumber Pinjaman Daerah

Sumber pinjaman daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Pemerintah Daerah lain.
- b. Lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

- c. Lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan atau pengadaan pinjaman pemerintah dari dalam negeri maupun luar negeri.
- e. Masyarakat.

4. Kegunaan Pinjaman Daerah

Kegunaan pinjaman daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Pinjaman jangka pendek hanya digunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- b. Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- c. Pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

5. Persyaratan dalam Melakukan Pinjaman Daerah

Persyaratan pinjaman daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah adalah:

a. Pinjaman Jangka Pendek

- 1). Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam APBD tahun yang bersangkutan.
- 2). Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
- 3). Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh calon pemberi pinjaman.

b. Pinjaman Jangka Menengah atau Jangka Panjang

- 1). Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
- 2). Rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5.
- 3). Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah.
- 4). Mendapat persetujuan DPRD.

6. Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah

Pembayaran kembali pinjaman daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah adalah:

- a. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan atau dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

- b. Pembayaran kembali pinjaman daerah dari pemerintah, dilakukan dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman antara Menteri Keuangan dan Kepala daerah.

7. Pelaporan dan Sanksi Pinjaman Daerah

Pelaporan dan sanksi pinjaman daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah adalah:

- a. Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Keterangan yang memuat semua pinjaman jangka menengah dan jangka panjang wajib dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.
- c. Setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh daerah merupakan dokumen publik dan diumumkan dalam lembaran daerah.
- d. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- e. Apabila daerah tidak dapat menyampaikan laporan posisi kumulatif dan kewajiban pinjaman maka Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran dana perimbangan.
- f. Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut

diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara yang menjadi hak dari daerah tersebut.

- g. Dalam hal daerah melakukan pinjaman langsung dari sumber luar negeri, Menteri Keuangan akan melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara yang menjadi hak daerah tersebut.

G. *Debt Service Coverage Ratio*

Pengertian *Debt Service Coverage Ratio* (PP No. 54 Tahun 2005)

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) merupakan rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah yang dihitung berdasarkan perbandingan antara proyeksi tahunan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil tidak termasuk Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib dan dibagi dengan proyeksi penjumlahan angsuran pokok pinjaman jangka panjang, bunga dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik.

Rumus *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* adalah sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) - \text{BW}}{(\text{P} + \text{B} + \text{BL})} \geq 2,5$$

Debt Service Coverage Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah jangka panjang. Besarnya DSCR ditentukan minimal 2,5 yang berarti setiap 1 rupiah

utang yang berupa angsuran pokok, bunga dan biaya lain dilunasi dengan pendapatan daerah sebesar 2,5 rupiah. *Debt Service Coverage Ratio* merupakan ambang batas pinjaman daerah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

H. Anggaran Sektor Publik

Menurut Mahsun dkk (2006: 81), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik.

1. Fungsi Anggaran

Menurut Nordiawan (2006: 48-49), beberapa fungsi anggaran dalam organisasi sektor publik antara lain:

a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.

b. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya.

c. Anggaran sebagai alat kebijakan

Melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.

d. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen bagian atau unit kerja dalam melaksanakan program yang telah dijanjikan.

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja yang lainnya.

f. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi dengan menjadikan nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran yang baik memenuhi sifat “menantang tapi masih mungkin dicapai”.

Menurut Bastian (2005: 164), anggaran berfungsi sebagai berikut:

- a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- b. Anggaran merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- c. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
- d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
- e. Anggaran sebagai alat komunikasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.

- f. Anggaran merupakan instrumen politik.
- g. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

2. Jenis Anggaran Sektor Publik

Menurut Mahsun dkk (2006: 83), jenis anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran operasional, yaitu anggaran yang berisi rencana kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah pusat atau daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan.
- b. Anggaran modal atau investasi, yaitu anggaran yang berisi rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap.

3. Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Menurut Bastian (2005: 166), karakteristik anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan nonkeuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
- e. Anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan berupa studi kasus, yaitu penelitian tentang objek tertentu, sehingga kesimpulan yang didapat hanya berlaku pada objek dan subjek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sleman.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sleman dan dilaksanakan pada bulan April tahun 2009 sampai bulan Juli tahun 2009.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah kepala bagian dan staf bagian keuangan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Objek penelitian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

D. Data yang Dibutuhkan

1. Gambaran umum Kabupaten Sleman
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Catatan atas Laporan Keuangan

E. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati serta menyalin dokumen atau catatan yang diperlukan dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah diatas adalah:

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) - \text{BW}}{(\text{P} + \text{B} + \text{BL})} \geq 2,5$$

Keterangan,

DSCR : *Debt Service Coverage Ratio*

PAD : Pendapatan asli daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

DAU : Dana alokasi umum

BW : Belanja wajib

P : Angsuran pokok pinjaman

B : Bunga pinjaman

BL : Biaya lainnya

Syarat untuk memperoleh pinjaman jangka panjang adalah *Debt Service Coverage Ratio* paling sedikit 2,5.

Untuk menghitung DSCR, penulis melakukan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Belanja Wajib dengan menggunakan Analisis *Time Series* dengan metode Jumlah Kuadrat Terkecil (*The Least Square Method*).

Analisis Time Series.

Analisis Time Series adalah suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur, yang dapat digunakan untuk peramalan di masa yang akan datang (Budiyowono, 1997: 213).

Persamaan garis trend dengan metode kuadrat terkecil dirumuskan:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan,

Y' : Nilai variabel dependen

a : Intercept Y, yakni nilai Y apabila $X = 0$ ($\sum Y / N$)

b : Lereng garis trend ($\sum XY / \sum X^2$)

X : Nilai variabel independen dalam trend adalah waktu

Langkah-langkah untuk menghitung DSCR sebagai berikut:

1. Menghitung persamaan trend Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, Belanja Wajib dengan metode kuadrat terkecil menggunakan data pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2001 sampai 2007.

2. Menghitung proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, Belanja Wajib.
3. Menghitung jumlah pinjaman yang bisa ditarik pada tahun 2008 menggunakan syarat pinjaman pada PP no. 54 Tahun 2005 yaitu jumlah sisa pinjaman dan pinjaman yang ditarik tidak melebihi 75% dari penerimaan umum APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2007.
4. Menentukan tingkat bunga berdasarkan suku bunga pinjaman dengan menggunakan asumsi dan jangka waktu pengembalian pinjaman jangka panjang lebih dari satu tahun anggaran dan pembayaran dilakukan pada tahun-tahun anggaran berikutnya setelah pinjaman ditarik.
5. Menghitung bunga pinjaman dan angsuran pokok pinjaman.
6. Menghitung DSCR dan menarik kesimpulan, setelah diketahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, Belanja Wajib, angsuran pinjaman maupun bunga pinjaman.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Pembentukan

Secara administratif, keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada Rijktsblad no. 11 tahun 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta (Mataram) dalam tiga kabupaten, yakni Kalasan, Bantul dan Sulaiman (yang kemudian disebut Sleman) dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Dalam Rijktsblad tersebut juga disebutkan bahwa Kabupaten Sulaiman (Sleman) terdiri dari empat distrik yaitu Distrik Mlati, Distrik Klegoeng, Distrik Joemeneng dan Distrik Godean.

Pada tahun 1940 wilayah Kasultanan Yogyakarta mengalami reorganisasi dengan munculnya Rijktsblad Van Jogjakarta no.13/1940 tanggal 18 maret 1940, Rijktsblad tersebut membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta dalam empat kabupaten yaitu Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul. Tanggal 8 april 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan penataan kembali wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei. Dalam Koorei tersebut dinyatakan wilayah Yogyakarta dibagi menjadi lima kabupaten yakni Kabupaten Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Penataan ini menempatkan Sleman sebagai wilayah kabupaten.

Pada tahun tersebut, bila dibandingkan dengan pemerintah kabupaten lainnya di tanah jawa, infrastruktur yang dimiliki Sleman sangat terbatas. Fasilitas yang dimiliki adalah pusat pemerintahan, pasar, masjid dan stasiun kereta api. Sedangkan infrastruktur seperti alun-alun, penjara, markas prajurit sebagai syarat ibukota tidak dimiliki. Di era revolusi para pegawai pemerintah meninggalkan ibukota Sleman, dalam keadaan demikian Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi sepi dan terjadi “bumi angkut” oleh gerombolan masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya gedung pemerintahan tidak layak lagi menjadi tempat pelayanan masyarakat.

Dalam kondisi gedung pelayanan masyarakat yang memprihatinkan, bupati Sleman KRT Pringgodingrat pada tahun 1947 memindahkan pusat pelayanan kabupaten ke Ambarukmo, di Petilasan Dalem serta bekas pusat pendidikan perwira polisi yang pertama di Indonesia. Dalam hal ini Ambarukmo merupakan pusat kegiatan pelayanan pemerintahan, bukan ibukota kabupaten. Pada tahun yang sama bupati KRT Pringgodingrat diganti oleh KRT Projodiningrat. Dalam periode ini, tepatnya tahun 1948 wilayah Kasultanan Yogyakarta mulai melaksanakan pemerintahan formal. Sesuai dengan UU no.22 tahun 1948, penyebutan wilayah Kabupaten Sleman adalah Kabupaten Sleman.

Pada tahun 1950 bupati KRT Projodiningrat digantikan oleh KRT Dipodiningrat hingga tahun 1955. Selanjutnya, KRT Dipodiningrat digantikan oleh KRT Prawirodiningrat yang menjabat bupati Sleman hingga tahun 1959. Pada masa itu pemerintah RI mengeluarkan UU no.1 Tahun 1957

mengenai Pembagian Daerah Republik Indonesia dan Aturan Otonomi Daerah, maka penyebutan kabupaten Sleman berubah menjadi daerah Swatantra. Sebagai implementasinya Departemen Dalam Negeri menerbitkan peraturan bahwa selain memiliki seorang bupati yang diangkat secara sektoral sebagai pegawai Kementrian Dalam Negeri, kabupaten juga harus memiliki kepala daerah yang dipilih legislatif (DPRD). Dengan kata lain, dalam periode pemerintahan ini sebuah kabupaten memiliki dua kepala daerah dan terpilih sebagai Kepala Daerah Swatantra adalah Buchori S. Pranotodiningrat. Seiring terbitnya Penetapan Presiden no.6 tahun 1959 dan no.5 tahun 1960 untuk memberlakukan kembali UUD 1945, pemerintah Kabupaten Sleman kembali dikepalai seorang bupati atau kepala daerah yang dijabat oleh KRT Murdodiningrat.

Pada tahun 1964, KRT Murdodiningrat memindahkan pusat pemerintahan ke Dusun Beran, Desa Tridadi Kecamatan Sleman. Lokasinya menempati bangunan kantor Bappeda Sleman dan pada masa ini pula Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman memiliki lambang daerah. Munculnya UU no.18 tahun 1965 mengenai hak otonomi daerah ditindaklanjuti DPRD Gotong Royong Daerah Tingkat II Sleman dengan menerbitkan SK no.19/1966 yang mengubah sebutan Pemerintah Daerah Tingkat II Sleman menjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman hingga saat ini.

B. Geografis dan Luas Wilayah

Sleman merupakan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sleman 574,82 km² atau 18% dari luas wilayah DIY terbentang di antara 110°33'00" dan 110°13'00" Bujur Timur, serta 734'51" dan 747'03" Lintang Selatan. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Magelang dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Secara administratif terbagi atas 17 kecamatan, 86 desa dan 1212 padukuhan.

Wilayah Kabupaten Sleman memiliki ketinggian antara 100 meter hingga 2500 meter di atas permukaan laut. Bagian selatan relatif datar dengan peruntukan utama sebagai lahan pertanian, industri dan permukiman. Sedangkan bagian utara merupakan lereng Gunung Merapi yang memiliki banyak potensi sumber air.

C. Kependudukan

Selama periode tahun 2003-2007 jumlah penduduk Kabupaten Sleman bertambah 43.744 orang yaitu dari 884.727 orang pada akhir tahun 2004 menjadi 928.471 orang pada akhir tahun 2007 atau rata-rata meningkat sebesar 1,26% per tahun. Selama lima tahun terakhir, penduduk yang datang sebanyak 69.996 orang, penduduk yang pindah sebanyak 41.557 orang sehingga terjadi migrasi masuk *netto* sebanyak 28.439 orang.

Kelahiran yang terjadi selama periode 2003-2007 sebanyak 47.590 orang sedangkan jumlah penduduk yang meninggal sebanyak 22.024, sehingga terjadi pertambahan penduduk alami sebanyak 25.120 orang. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman bersifat fluktuatif, pada tahun 2003 sebesar 1,14%, meningkat pada tahun 2004 menjadi 1,20%, tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 1,17%, tahun 2006 1,11% dan tahun 2007 kembali meningkat menjadi 1,30%.

D. Perekonomian Daerah

Terdapat empat sektor pendukung utama perekonomian di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran (21,98%), sektor jasa (18,83%), sektor industri (15,09%), dan sektor pertanian (13,36%). Dua sektor lain yang sangat cukup signifikan kontribusinya adalah sektor bangunan (12,17%) dan sektor keuangan, persewaan dan jasa keuangan (10,64%).

Selama empat tahun terakhir, kontribusi sektor primer terus mengalami penurunan dari 15,50% pada tahun 2004 menjadi 14,77% tahun 2005, 14,41% tahun 2006 dan menjadi 13,99% pada tahun 2007. Kontribusi sektor sekunder meningkat dari 26,97% pada tahun 2004 menjadi 27,67% tahun 2005, 28,07% tahun 2006 dan 28,51% tahun 2007.

E. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 mencapai 4,61% sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2006 (4,50%). Sektor primer tumbuh sebesar 1,37%, sektor sekunder 4,69%, dan

sektor tersier 5,62%. Satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan negatif adalah sektor pertanian yaitu sebesar -0,13% yang disebabkan oleh pertumbuhan negatif sub-sektor tanaman bahan makanan sebesar 1,68%. Sub-sub sektor dengan laju pertumbuhan jauh di atas pertumbuhan rata-rata adalah sub-sektor penggalian (74,60%), bank (17,26%), pos dan telekomunikasi (14,57%), dan hotel (11,01%).

F. Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Sleman selama 5 tahun terakhir sangat berfluktuasi. Setelah menurun tajam dari 11,9% pada tahun 2002 menjadi 4,52% pada tahun 2003, laju inflasi kembali meningkat menjadi 6,58% tahun 2004 dan meningkat tajam menjadi 15,48% pada tahun 2005. Pada tahun 2006, tingkat inflasi mengalami penurunan tajam menjadi 10,88% dan kembali menurun menjadi 7,62% pada tahun 2007.

Kelompok pengeluaran dengan tingkat inflasi tertinggi tahun 2007 adalah bahan makanan (11,12%), pendidikan, rekreasi dan olahraga. Sedangkan kelompok pengeluaran dengan tingkat inflasi terendah adalah transportasi dan komunikasi (1,92%) dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (3,35%).

G. Investasi

Potensi investasi dunia usaha bidang pertanian meliputi komoditas hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Sedangkan potensi investasi di bidang pariwisata antara lain meliputi usaha wisata alam, wisata candi, museum, wisata olahraga, wisata pendidikan, wisata budaya, dan wisata agro.

Di bidang industri potensi investasi meliputi industri pengemasan, industri pengolahan, dan industri pengolahan bahan galian golongan C.

Penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2007 meliputi investasi PMA sebanyak 36 unit usaha dengan nilai investasi sebesar US\$ 148,82 juta dan menyerap tenaga kerja 6.163 orang. Investasi PMDN 36 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 344,99 miliar dan menyerap tenaga kerja 9.387 orang. Investasi non fasilitas sebanyak 26.779 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 1.712,88 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 201.832 orang.

H. Pertanian

Produktivitas padi sawah di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 rata-rata mencapai 57,17 kw/ha gabah kering giling (GKG), menurun 0,31 kw/ha dibanding produktivitas tahun 2006. Dengan luas panen bersih 42,450 hektar, diperoleh produksi padi 242.878 ton GKG yang memberikan surplus beras 82.440 ton atau 8,46% lebih rendah dibanding surplus beras tahun 2006.

Luas lahan usaha perikanan kolam meningkat 0,83% yaitu dari 555,62 hektar pada tahun 2006 menjadi 560,21 hektar pada tahun 2007, sedangkan luas lahan usaha mina padi menyusut 4,43% yaitu dari 785,25 hektar menjadi 750,50 hektar. Produksi ikan konsumsi mencapai 8.148,85 ton (meningkat 17,40%), produksi benih ikan mencapai 532.156.500 ekor (meningkat 28,46%), dan produksi ikan hias mencapai 7.818.000 ekor (meningkat 21,15%). Rata-rata konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2007 mencapai 23,14 kg/kapita meningkat 15,31% dibanding tahun 2006.

Pada tahun 2007 terdapat 455 kelompok tani ternak di Kabupaten Sleman, meningkat 6,06% dibanding tahun 2006. Populasi ternak sapi potong sebanyak 47.352 ekor, sapi perah 5.589 ekor, kerbau 3.474 ekor, kuda 387 ekor, babi 4.538 ekor, kambing 32.354 ekor, domba 56.997 ekor, ayam buras 1.571.706 ekor, ayam petelur 1.540.932 ekor, ayam pedaging 2.681.775 ekor, itik 195.848 ekor, dan burung puyuh 901.425 ekor. Produksi hasil ternak yang utama adalah daging (20.515,8 ton), telur (17.523,7 ton), dan susu (6.687,9 ton).

Luas hutan di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 meningkat 7,60% yaitu dari 5.181,8 hektar menjadi 5.575,7 hektar. Penambahan luas hutan terutama berupa hutan rakyat yang meningkat 11,42%, dari 3.450 hektar menjadi 3.844 hektar. Produksi utama kehutanan berupa kayu 14.578,4 m, madu lebah 1.730 kg, dan kokon ulat sutera 4.627 kg.

Luas lahan perkebunan meningkat 7,21% yaitu dari 8.269 hektar pada tahun 2006 menjadi 8.865,7 hektar pada tahun 2007. Produksi utama yang dihasilkan berupa kelapa 83.417,2 kwintal, tebu 54.224,7 kwintal, mendong 28.476 kwintal, tembakau 8.488,1 kwintal, kopi 883,4 kwintal, kakao 300,2 kwintal, dan cengkeh 94,8 kwintal. Untuk meningkatkan hasil perkebunan, telah ditanam 500 batang kelapa, 1.000 batang panili, lada 500 batang, mete 5.000 batang, dan perluasan tanam pohon jarak sebanyak 33.000 batang.

I. Industri

Banyaknya industri kecil di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 mencapai 14.555 perusahaan, terdiri dari 14.466 industri kecil (IK) dan 89 industri besar dan menengah (IBM). Lebih dari separoh (yaitu 7.605 perusahaan atau 52,6%) industri kecil terdapat di wilayah barat (Kecamatan Moyudan, Minggir, Seyegan, Godean dan Gamping). Sebaliknya, hanya 11 perusahaan (12,4%) industri besar dan menengah yang berada di wilayah barat, sedang selebihnya berada di wilayah tengah dan timur.

Selama tahun 2007, tenaga kerja yang terserap di sektor industri sebanyak 63.635 orang, meningkat 1,73%. Nilai produksi industri kecil mencapai Rp 581,48 miliar dan nilai produksi industri menengah dan besar mencapai Rp 2.237,98 miliar.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan teknik analisis data yang telah penulis jabarkan, sebelum menghitung *Debt Service Coverage Ratio* penulis melakukan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi umum, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi dan Belanja Wajib menggunakan analisis *Time Series*.

A. Menghitung persamaan trend

$$Y' = a + bX$$

Keterangan,

Y' : Nilai variabel dependen

a : Intercept Y, yakni nilai Y apabila $X = 0$ ($\sum Y / N$)

b : Lereng garis trend ($\sum XY / \sum X^2$)

X : Nilai variabel independen dalam trend adalah waktu

Tabel 5.1 Perhitungan Persamaan Trend Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun Anggaran	PAD (Y)	X	XY	X ²
2001	Rp.26.616.137.717	-3	-79.848.413.151	9
2002	Rp.34.846.979.982	-2	-69.693.959.964	4
2003	Rp.43.494.246.800	-1	-43.494.246.800	1
2004	Rp.53.919.261.011	0	0	0
2005	Rp.66.511.686.403	1	66.511.686.403	1
2006	Rp.75.792.320.330	2	151.585.640.660	4
2007	Rp.94.896.446.720	3	284.689.340.160	9
Σ	Rp.396.077.079.003	0	309.749.047.400	28

Sumber: Data diolah

Persamaan untuk PAD adalah $Y' = 56.582.439.860 + 11.062.465.980 X$, dimana:

a sebesar 56.582.439.860 merupakan konstanta yang berarti pada saat $x = 0$ tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 56.582.439.860 dan **b** sebesar 11.062.465.980 merupakan koefisien yang menyatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun sebesar Rp 11.062.465.980.

Tabel 5.2 Perhitungan Persamaan Trend Dana Bagi Hasil (DBH)

Tahun Anggaran	DBH (Y)	X	XY	X ²
2001	Rp.15.907.855.030	-3	-47.723.565.090	9
2002	Rp.21.184.390.110	-2	-42.368.780.220	4
2003	Rp.24.876.641.000	-1	-24.876.641.000	1
2004	Rp.32.350.000.000	0	0	0
2005	Rp.34.500.000.000	1	34.500.000.000	1
2006	Rp.35.500.000.000	2	71.000.000.000	4
2007	Rp.62.079.000.000	3	186.237.000.000	9
Σ	Rp.226.397.886.140	0	176.768.013.700	28

Sumber: Data diolah

Persamaan untuk DBH adalah $Y' = 32.342.555.160 + 6.313.143.346 X$, dimana:

a sebesar 32.342.555.160 merupakan konstanta yang berarti pada saat $x = 0$ tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 32.342.555.160 dan **b** sebesar 6.313.143.346 merupakan koefisien yang menyatakan bahwa peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) setiap tahun sebesar Rp 6.313.143.346.

Tabel 5.3 Perhitungan Persamaan Trend Dana Alokasi Umum (DAU)

Tahun Anggaran	DAU (Y)	X	XY	X ²
2001	Rp.205.430.000.000	-3	-616.290.000.000	9
2002	Rp.255.350.000.000	-2	-510.700.000.000	4
2003	Rp.304.780.000.000	-1	-304.780.000.000	1
2004	Rp.307.330.000.000	0	0	0
2005	Rp.318.139.000.000	1	318.139.000.000	1
2006	Rp.485.397.000.000	2	970.794.000.000	4
2007	Rp.543.065.000.000	3	1.629.195.000.000	9
Σ	Rp.2.419.491.000.000	0	1.486.358.000.000	28

Sumber: Data diolah

Persamaan untuk DAU adalah $Y' = 345.641.571.400 + 53.084.214.290 X$, dimana:

a sebesar 345.641.571.400 merupakan konstanta yang berarti pada saat $x = 0$ tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 345.641.571.400 dan **b** sebesar 53.084.214.290 merupakan koefisien yang menyatakan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahun sebesar Rp 53.084.214.290.

Tabel 5.4 Perhitungan Persamaan Trend Belanja Wajib (BW)

Tahun Anggaran	BW (Y)	X	XY	X ²
2001	Rp.203.609.704.100	-3	-610.829.112.300	9
2002	Rp.290.403.458.100	-2	-580.806.916.200	4
2003	Rp.297.555.905.700	-1	-297.555.905.700	1
2004	Rp.337.748.744.400	0	0	0
2005	Rp.344.801.215.800	1	344.801.215.800	1
2006	Rp.427.336.430.419	2	854.672.860.838	4
2007	Rp.533.823.068.952,22	3	1.601.469.206.857	9
Σ	Rp.2.435.278.528.277,22	0	1.311.751.347.295	28

Sumber: Data diolah

Persamaan untuk BW adalah $Y' = 347.896.932.600 + 46.848.262.390 X$, dimana:
a sebesar 347.896.932.600 merupakan konstanta yang berarti pada saat $x = 0$ tahun 2004 Belanja Wajib (BW) sebesar Rp 347.896.932.600 dan **b** sebesar 46.848.262.390 merupakan koefisien yang menyatakan bahwa peningkatan Belanja Wajib (BW) setiap tahun sebesar Rp 46.848.262.390.

Perhitungan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi tidak dilakukan penulis disebabkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman tidak terdapat akun tersebut, dan dianggap nol.

B. Menghitung proyeksi PAD, DBH, DAU dan BW

Untuk menghitung proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Wajib (BW) menggunakan persamaan trend yang telah diperoleh. Proyeksi yang dilakukan hanya pada tahun 2009, digunakan untuk menghitung *Debt Service Coverage Ratio* tahun 2009 saat pertama Pemerintah Kabupaten Sleman membayar angsuran pinjaman daerah.

Perhitungan proyeksi PAD tahun 2009:

Jarak X saat 0 (tahun 2004) dengan tahun yang akan diproyeksi adalah 5, X diganti dengan 5. Maka:

$$\begin{aligned} Y' &= 56.582.439.860 + 11.062.465.980 X \\ &= 56.582.439.860 + 11.062.465.980 (5) \\ &= 111.894.769.800 \end{aligned}$$

Hasil proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2009 adalah Rp 111.894.769.800.

Perhitungan proyeksi DBH tahun 2009:

$$\begin{aligned} Y' &= 32.342.555.160 + 6.313.143.346 X \\ &= 32.342.555.160 + 6.313.143.346 (5) \\ &= 63.908.271.890 \end{aligned}$$

Hasil proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Sleman tahun 2009 adalah Rp 63.908.271.890.

Perhitungan proyeksi DAU tahun 2009:

$$\begin{aligned} Y' &= 345.641.571.400 + 53.084.214.290 X \\ &= 345.641.571.400 + 53.084.214.290 (5) \\ &= 611.062.642.900 \end{aligned}$$

Hasil proyeksi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sleman tahun 2009 adalah Rp 611.062.642.900.

Perhitungan proyeksi BW tahun 2009:

$$\begin{aligned} Y' &= 347.896.932.600 + 46.848.262.390 X \\ &= 347.896.932.600 + 46.848.262.390 (5) \\ &= 582.138.244.600 \end{aligned}$$

Hasil proyeksi Belanja Wajib (BW) Kabupaten Sleman tahun 2009 adalah Rp 582.138.244.600

C. Menghitung proyeksi angsuran pokok pinjaman dan bunga

Sebelum melakukan proyeksi angsuran pinjaman dan bunga pinjaman, penulis melakukan perhitungan jumlah pinjaman yang bisa ditarik pada tahun 2008 menggunakan syarat pinjaman pada PP no. 54 Tahun 2005 yaitu jumlah sisa

pinjaman dan pinjaman yang ditarik tidak melebihi 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya yaitu tahun 2007

Tabel 5.5 Batas Maksimum Pinjaman (dalam Rupiah).

Keterangan	2007	2008
Penerimaan umum Daerah	700.040.446.720	-
Batas Pinjaman	-	525.030.335.000

Sumber: Data diolah

Dari tabel 5.5 Pemerintah Kabupaten Sleman dapat mengambil pinjaman sebesar Rp.525.030.335.000. Batas pinjaman daerah sebesar Rp.525.030.335.000 merupakan 75% dari jumlah penerimaan umum daerah. Pada tabel 5.6 dapat dilihat jumlah pinjaman yang bisa ditarik dan sisa pinjaman sebelumnya.

Tabel 5.6 Pinjaman yang ditarik dan sisa pinjaman (dalam Rupiah).

Keterangan	
Batas Pinjaman Daerah (1)	525.030.335.000
Sisa Pinjaman (2)	964.214.500
Pinjaman yang bisa ditarik (1 – 2)	524.066.120.500

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dihitung proyeksi angsuran pokok pinjaman dan bunga pinjaman setiap tahun. Pembayaran pinjaman jangka panjang akan dimulai pada tahun anggaran berikutnya, yaitu tahun anggaran 2009. Dengan menggunakan asumsi tingkat bunga pinjaman adalah 12% per tahun dihitung dengan mengalikan sisa pokok pinjaman setiap tahun, jangka waktu pengembalian pinjaman jangka panjang adalah 30 tahun. Tabel 5.7 menunjukkan proyeksi angsuran pokok pinjaman daerah dan bunga pinjaman Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan pinjaman yang akan ditarik pada tahun 2008.

Tabel 5.7 Angsuran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman (dalam Rupiah).

Tahun	Angsuran Pokok Pinjaman (1)	Sisa Pokok Pinjaman (2)	Bunga Pinjaman (3)	Angsuran pokok Pinjaman Periode lalu (4)	Bunga Pinjaman (5)	Jumlah (1 + 3 + 4 + 5)
2009	18.071.245.530	505.994.874.470	62.887.934.460	137.744.928,4	80.926.145	81.177.851.060
2010	18.071.245.530	487.923.628.940	60.719.385.000	137.744.928,4	64.740.116	79.009.301.600
2011	18.071.245.530	469.852.383.410	58.550.835.460	137.744.928,4	48.555.087	76.824.566.030
2012	18.071.245.530	451.781.137.880	56.382.286.010	137.744.928,4	32.370.058	74.639.831.560
2013	18.071.245.530	433.709.892.350	54.213.736.540	137.744.928,4	16.185.029	72.455.097.060
2014	18.071.245.530	415.638.646.820	52.045.187.070	137.744.928,4	0	70.270.362.560

Sumber: Data diolah dan Pemerintah Kabupaten Sleman

Tabel 5.8 Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Wajib (dalam Rupiah).

Tahun	PAD (1)	DBH (2)	DAU (3)	BW (4)	Jumlah (1 + 2 + 3) - 4)
2009	111.894.769.800	63.908.271.890	611.062.642.900	582.138.244.600	204.727.440.190

Sumber: Data diolah

Tabel 5.7 menunjukkan proyeksi angsuran pokok Pemerintah Kabupaten Sleman yang jumlahnya tetap setiap tahunnya berdasarkan jumlah pinjaman yang akan ditarik dan jumlah bunga pinjaman turun setiap tahunnya seiring dengan semakin kecil jumlah sisa pinjaman daerah.

D. Menghitung *Debt Service Coverage Ratio*

Untuk menghitung *Debt Service Coverage Ratio* menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) - \text{BW}}{(\text{P} + \text{B} + \text{BL})} \geq 2,5$$

Perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2009:

$$\begin{aligned} \text{DSCR} &= \frac{204.727.440.190}{81.177.851.060} \\ &= 2,5 \end{aligned}$$

E. Pembahasan

Pada perhitungan di atas menunjukkan bahwa *Debt Service Coverage Ratio* Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2009 sebesar 2,5 yang berarti setiap 1 rupiah utang yang berupa angsuran pokok, bunga dan biaya lain dapat dilunasi dengan pendapatan daerah sebesar 2,5 rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman cukup untuk menutup beban utang

jangka panjang berupa angsuran pokok pinjaman dan bunga pinjaman pada tahun tersebut. Syarat untuk memperoleh pinjaman jangka panjang adalah *Debt Service Coverage Ratio* paling sedikit 2,5 yang berarti pada tahun 2008 Pemerintah kabupaten Sleman layak untuk memperoleh pinjaman daerah dan Pemerintah Kabupaten Sleman mampu untuk membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman yang jatuh tempo setiap tahunnya.

Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa dari hasil perhitungan tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Sleman layak dan mampu untuk melakukan pinjaman daerah khususnya pinjaman jangka panjang. Syarat untuk memperoleh pinjaman jangka panjang sesuai dengan PP no. 54 Tahun 2005 adalah 2,5 yang akan dipergunakan untuk pembiayaan daerah berupa pengadaan sarana dan prasarana atau untuk membangun infrastuktur yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa *Debt Service Coverage Ratio* pada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2009 adalah 2,5 dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP no. 54 Tahun 2005 untuk melakukan pinjaman yang mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Sleman layak dan mampu untuk mengadakan pinjaman daerah.

Di masa yang akan datang, pinjaman daerah dapat menjadi sumber pembiayaan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga untuk membangun infrastruktur sarana dan prasarana yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, tapi pada jangka panjang dapat menyejahterakan masyarakat yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sleman, penulis hanya mengambil data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah otonomi daerah tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2007 dan menggunakan analisis trend yang berarti bahwa sifat dari trend linear yang konstan (naik atau turun) dengan mengetahui pola data pada masa lalu.

C. Saran

Setelah melakukan pengolahan data mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum maupun Belanja Wajib dan *Debt Service Coverage Ratio*, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin diperlukan atau bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman maupun bagi peneliti selanjutnya.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten, pinjaman daerah merupakan alternatif pembiayaan yang potensial. Pemerintah Kabupaten Sleman dapat menggunakan pinjaman daerah tersebut untuk pembiayaan daerah berupa pengadaan sarana dan prasarana atau untuk membangun infrastruktur yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan daerah.
2. Bagi para peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian dilakukan dengan membandingkan *Debt Service Coverage Ratio* beberapa Pemerintah Daerah yang berbeda kondisi dan kemampuan keuangan daerah masing-masing agar penelitian selanjutnya lebih berkembang dari penelitian sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Budiyuwono, Nugroho. 1997. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*, Jilid 1. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Dimiyati, Nurlaela., Fancholik Joko P., Ahmad Yani dan Bambang Aryanto. 2002. *Pinjaman Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 03. No. 02, Agustus. Hal 28-39
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mahsun, Mohamad., Firma Sulistiyowati dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005, tentang “Pinjaman Daerah”
- Santoso, Rokhedi. 2003. *Analisis Pinjaman Sebagai Potensi Pembiayaan Pembangunan Daerah. Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 8. No. 2 Desember Hal. 147-158
- Supardiyono, Gabriel Anto Listianto, Edi Kustanto, Gien Agustinawansari. 2007. *Panduan Penulisan dan Ujian Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerinah Pusat dan Pemerintah Daerah”
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang “Pemerintahan Daerah”

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
 Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 625 / 2009

**TENTANG
 PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
 Menunjuk : Surat dari Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nomor: 31/Kaprodi.Man/358/III/2009 Tanggal: 31 Maret 2009. Hal: Permohonan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
 Nama : DWIYONO
 No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 032114144
 Program/Tingkat : S1
 Instansi/Perguruan Tinggi : USD Yogyakarta
 Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta
 Alamat Rumah : Jl. Monjali Gg. Napas No. 74 Sleman
 No. Telp/ HP : 085648486026
 Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul:
 "ANALISIS PINJAMAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH"
 Lokasi : Kab. Sleman
 Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 02 April 2009 s/d 02 Juli 2009

Dengan ketentuan sebagai berikut :

6. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
7. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
8. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar atau CD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.*
9. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.*
10. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
 Pada Tanggal : 02 April 2009

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. BPKD Kab. Sleman
4. Ka. Bid. Perenc. Sosek Bappeda Kab. Sleman
5. Dekan Fak. Ekonomi – USD Yogyakarta
6. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
 Ka. Bidang Tekn. & Kerjasama
 u.p. Ka. Sub Bid. Data & Informasi



Dra. Hj. Sri Subekti Handayani
 NIP. 19590404 199403 2 003

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003

Nomor	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2003	REALISASI 2003	PERBEDAAN ANGGARAN DAN REALISASI
			RP	
1	2	3	4	
	PENDAPATAN			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.494.246.800,00	52.972.697.477,69	9.478.450.677,69
1.1	Pajak Daerah	19.300.000.000,00	24.907.210.488,00	5.607.210.488,00
1.2	Retribusi Daerah	13.136.561.000,00	14.246.405.051,75	1.109.844.051,75
1.3	Bagian Laba Badan Usaha Daerah	2.502.558.000,00	2.310.617.215,60	(191.940.784,40)
1.4	Lain-lain Pendapatan	8.555.127.800,00	11.508.464.722,34	2.953.336.922,34
2	DANA PERIMBANGAN	360.322.608.000,00	369.717.141.971,41	9.394.533.971,41
2.1	Pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	24.876.641.000,00	29.173.396.369,00	4.296.755.369,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	304.780.000.000,00	304.780.000.000,00	-
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	-
2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	20.065.967.000,00	25.163.745.602,41	5.097.778.602,41
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	20.355.000.000,00	30.188.785.569,00	9.833.785.569,00
	Jumlah Pendapatan	424.171.854.800,00	452.878.625.018,10	28.706.770.218,10
	BELANJA			
1	APARATUR DAERAH	146.454.915.201,00	138.454.424.609,05	(8.000.490.591,95)
1.1	Belanja Administrasi Umum	71.983.342.196,00	70.267.133.110,12	(1.716.209.085,88)
1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	62.690.792.307,00	61.626.930.932,00	(1.063.861.375,00)
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.130.757.389,00	5.599.289.485,12	(531.467.903,88)
1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.456.351.200,00	1.388.288.260,00	(68.062.940,00)
1.1.4	Belanja Pemeliharaan	1.705.441.300,00	1.652.624.433,00	(52.816.867,00)
1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	33.730.665.738,00	30.985.762.210,95	(2.744.903.527,05)
1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	13.058.841.448,00	11.923.206.541,95	(1.135.634.906,05)
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.221.042.890,00	15.835.692.494,00	(1.385.350.396,00)
1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	537.409.400,00	386.644.615,00	(150.764.785,00)
1.2.4	Belanja Pemeliharaan	2.913.372.000,00	2.840.218.560,00	(73.153.440,00)
1.3	Belanja Modal	40.740.907.267,00	37.201.529.287,98	(3.539.377.979,02)
2	PELAYANAN PUBLIK	329.501.581.401,96	309.021.859.844,77	(20.479.721.557,19)
2.1	Belanja Administrasi Umum	231.027.751.881,00	217.098.206.725,59	(13.929.545.155,50)
2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	217.000.071.217,00	203.449.447.692,50	(13.550.623.524,50)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.773.618.214,00	12.403.207.476,50	(370.410.737,50)
2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	18.490.000,00	18.474.900,00	(15.100,00)
2.1.4	Belanja Pemeliharaan	1.235.572.450,00	1.227.076.656,50	(8.495.793,50)
2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	29.919.423.756,00	29.033.855.580,20	(885.568.175,80)
2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	4.806.200.806,00	4.618.017.053,00	(188.183.753,00)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.102.318.960,00	19.528.344.822,86	(573.974.137,14)
2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	515.110.000,00	478.964.600,00	(36.145.400,00)
2.2.4	Belanja Pemeliharaan	4.495.793.990,00	4.408.529.104,34	(87.264.885,66)
2.3	Belanja Modal	43.252.551.183,00	41.041.208.324,07	(2.211.342.858,93)
2.4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Kesangan	19.015.204.050,00	18.445.065.965,00	(570.138.085,00)
2.5	Belanja Tak Tersangka	6.286.850.531,96	3.403.523.250,00	(2.883.327.281,96)
	Jumlah Belanja :	475.956.496.602,96	447.476.284.453,82	(28.480.212.149,14)
	Surplus/(Defisit)		5.402.340.564,28	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Daerah	44.999.641.802,96	47.893.357.850,01	
3.1.1	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	44.999.641.802,96	45.430.633.050,01	
3.1.2				
3.1.3	Pengeluaran Daerah		2.462.724.800,00	
3.1.4	Sisa Perhitungan Tahun Berkenaan			
	Jumlah Pembiayaan :	44.999.641.802,96		

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR : 5 TAHUN 2005
 TANGGAL : 4 AGUSTUS 2005

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2004

KODER	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI		BERLEBIH (BERURANG) DARI ANGGARAN	
		SYL PERUBAHAN	SEBELUM AUDIT	AUDITAN	SEBELUM AUDIT	AUDITAN	
I.	PENDAPATAN:						
1.	Pendapatan Asli Daerah	53.919.261.011,00	60.112.311.537,77	70.499.050.996,77	6.193.050.526,77	16.579.789.935,77	
1.1.	Pajak Daerah	28.327.600.000,00	30.715.060.955,07	35.217.823.267,07	2.387.460.955,07	6.890.223.267,07	
1.1.1.	Ratibus Daerah	19.300.864.000,00	21.911.584.143,90	27.795.561.290,90	2.610.720.143,90	8.494.697.290,90	
1.1.3.	Bagian Laba Badan Usaha Daerah	3.313.387.011,00	3.848.890.120,96	3.848.890.120,96	535.503.109,96	535.503.109,96	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan	2.977.410.000,00	3.636.776.317,84	3.636.776.317,84	659.366.317,84	659.366.317,84	
1.2.	Dana Perimbangan	373.811.600.000,00	399.951.712.236,41	399.951.712.236,41	16.140.112.236,41	16.140.112.236,41	
1.2.1.	Pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	32.350.000.000,00	38.534.157.863,00	38.534.157.863,00	6.184.157.863,00	6.184.157.863,00	
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	307.300.000.000,00	307.331.000.000,00	307.331.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	9.400.000.000,00	9.480.000.000,00	9.480.000.000,00	0,00	0,00	
1.2.4.	Dana Perimbangan dari Propinsi	24.651.600.000,00	34.606.554.373,41	34.606.554.373,41	9.954.954.373,41	9.954.954.373,41	
1.3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	21.210.000.000,00	31.117.436.860,00	31.117.436.860,00	9.877.436.860,00	9.877.436.860,00	
	Jumlah Pendapatan:	448.970.861.011,00	481.181.460.634,18	491.568.200.093,18	32.210.599.623,18	42.597.339.082,18	
II.	BELANJA						
2.1.	APARATUR DAERAH	143.594.709.400,51	116.944.964.230,26	121.123.505.646,26	(26.649.745.170,25)	(22.471.203.754,75)	
2.1.1.	Belanja Administrasi Umum	86.241.185.720,51	64.786.378.247,84	68.879.857.663,84	(21.454.807.472,67)	(17.361.328.056,67)	
2.1.1.1.	Belanja Pegawai/Personalia	75.073.203.947,52	54.346.090.941,09	55.188.519.623,09	(20.727.113.006,43)	(19.894.684.324,43)	
2.1.1.2.	Belanja Barang	8.032.957.272,99	7.495.093.690,75	10.768.428.199,75	(537.866.582,24)	2.735.471.926,76	
2.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.387.338.000,00	1.274.066.570,00	1.279.166.550,00	(113.271.450,00)	(108.171.450,00)	
2.1.1.4.	Belanja Pemeliharaan	1.747.686.500,00	1.671.131.066,00	1.643.742.291,00	(76.556.434,00)	(103.944.209,00)	
2.1.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	31.993.401.130,00	27.642.748.956,00	27.645.975.356,00	(4.350.652.174,00)	(4.347.425.774,00)	
2.1.2.1.	Belanja Pegawai/Personalia	13.598.365.500,00	11.742.150.400,00	11.754.650.450,00	(1.856.215.050,00)	(1.843.715.050,00)	
2.1.2.2.	Belanja Barang	16.275.464.630,00	14.143.653.076,00	14.001.489.776,00	(2.132.811.554,00)	(2.274.974.854,00)	
2.1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	765.928.700,00	502.104.600,00	541.255.600,00	(263.824.100,00)	(224.673.100,00)	
2.1.2.4.	Belanja Pemeliharaan	1.352.642.300,00	1.254.840.830,00	1.348.579.530,00	(97.801.470,00)	(4.062.770,00)	
2.1.3.	Belanja Modal	25.360.122.550,00	24.515.837.026,42	24.597.672.626,42	(844.285.523,58)	(762.449.923,58)	
2.2.	PELAYANAN PUBLIK	378.147.477.016,28	363.314.523.051,75	366.954.044.281,75	(14.832.953.964,53)	(11.193.432.734,53)	
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	250.774.303.426,60	253.493.343.372,00	257.009.447.002,00	(7.280.960.054,60)	(3.764.856.424,60)	
2.2.1.1.	Belanja Pegawai/Personalia	242.750.129.921,60	235.533.599.137,00	235.474.259.137,00	(7.216.530.784,60)	(7.275.830.784,60)	
2.2.1.2.	Belanja Barang	16.814.259.680,00	16.750.218.450,00	20.328.702.080,00	(64.041.230,00)	3.514.442.400,00	
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.820.000,00	10.649.700,00	10.649.700,00	(170.300,00)	(170.300,00)	
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	1.199.093.825,00	1.198.876.085,00	1.195.796.085,00	(217.740,00)	(3.297.740,00)	
2.2.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	29.377.080.485,00	27.970.759.051,75	27.982.260.431,75	(1.406.321.433,25)	(1.394.820.053,25)	
2.2.2.1.	Belanja Pegawai/Personalia	6.327.045.075,00	5.956.654.076,86	5.980.768.076,86	(370.390.998,14)	(346.276.998,14)	
2.2.2.2.	Belanja Barang	19.576.190.340,00	18.779.879.262,89	18.774.562.192,89	(796.311.077,11)	(801.628.147,11)	
2.2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	920.950.000,00	847.269.770,00	850.745.770,00	(73.680.230,00)	(70.204.230,00)	
2.2.2.4.	Belanja Pemeliharaan	2.552.895.070,00	2.386.955.942,00	2.376.184.392,00	(165.939.128,00)	(176.710.678,00)	
2.2.3.	Belanja Modal	59.211.010.490,00	53.681.021.849,00	53.732.188.069,00	(5.529.988.641,00)	(5.478.822.421,00)	
2.2.4.	Belanja Bagi Hasil dan Bant. Keu.	25.682.385.600,00	25.334.147.459,00	25.394.897.459,00	(348.238.141,00)	(287.488.141,00)	
2.2.5.	Belanja Tak Tersangka	3.102.697.014,68	2.835.251.320,00	2.835.251.320,00	(267.445.694,68)	(267.445.694,68)	
	Jumlah Belanja:	521.742.186.416,79	480.259.487.282,01	488.077.549.928,01	(41.482.699.134,78)	(33.664.636.488,78)	
	Surplus/(Defisit)	(72.771.325.405,79)	921.973.352,17	3.490.650.165,17	73.693.298.757,96	76.261.975.570,96	

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AUDITAN
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005 dan 2004
SEBELUM KONVERSI

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2005	REALISASI 2005		REALISASI 2004	PERBEDAAN ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI 2005
		(dalam rupiah)			
		RP	%		
2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN:					
Pendapatan Asli Daerah	66.511.686.403,00	77.904.742.688,20	117,13	70.499.050.996,77	11.393.056.285,20
Pajak Daerah	33.067.758.825,00	36.938.630.959,38	110,80	35.217.823.267,07	3.570.882.134,38
Retribusi Daerah	26.856.179.200,00	30.067.556.699,14	111,96	27.795.561.290,90	3.211.377.499,14
Bagian Laba Badan Usaha Daerah	3.319.207.228,00	4.028.081.206,99	121,36	3.848.890.120,96	708.873.978,99
Lain-lain Pendapatan	3.268.531.150,00	7.170.473.822,69	219,38	3.636.776.317,84	3.901.942.672,69
Dana Perimbangan	395.849.000.000,00	417.413.902.174,84	105,45	389.951.712.236,41	21.564.902.174,84
Pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	34.500.000.000,00	46.647.017.189,00	135,21	38.534.157.863,00	12.147.017.189,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	318.139.000.000,00	318.139.000.000,00	100,00	307.331.000.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	100,00	9.480.000.000,00	0,00
Dana Perimbangan dari Propinsi	32.610.000.000,00	42.027.884.985,84	128,88	34.606.554.373,41	9.417.884.985,84
Lain-lain Pendapatan 'ang Sah	22.230.230.000,00	25.230.230.000,00	113,50	31.117.436.860,00	3.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan:	484.590.916.403,00	520.548.874.863,04	107,42	491.568.200.093,18	35.957.938.460,04
BELANJA					
APARATUR DAERAH	135.404.824.253,00	101.886.834.178,87	75,25	121.123.505.646,26	(33.517.930.074,33)
Belanja Administrasi Umum	93.807.255.381,00	69.591.680.577,57	74,19	68.879.857.663,84	(24.215.574.803,43)
Belanja Pegawai/Personalia	79.838.410.956,00	56.930.811.056,07	71,31	55.189.519.623,09	(22.907.599.900,93)
Belanja Barang dan Jasa	11.162.230.455,00	10.219.740.154,50	91,56	10.768.429.199,75	(942.410.300,50)
Belanja Perjalanan Dinas	1.009.364.500,00	704.513.530,00	69,80	1.279.166.550,00	(304.830.920,00)
Belanja Pemeliharaan	1.797.249.460,00	1.736.615.787,00	96,63	1.643.742.291,00	(60.633.673,00)
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	34.008.605.772,00	27.031.237.601,10	79,48	27.645.975.356,00	(6.977.368.170,90)
Belanja Pegawai/Personalia	12.284.632.760,00	10.288.141.000,00	83,75	11.754.650.450,00	(1.999.691.760,00)
Belanja Barang dan Jasa	17.186.683.837,00	13.654.582.101,10	79,45	14.001.489.776,00	(3.532.101.735,90)
Belanja Perjalanan Dinas	2.822.937.900,00	1.811.562.570,00	64,17	541.255.600,00	(1.011.375.030,00)
Belanja Pemeliharaan	1.714.151.575,00	1.276.951.930,00	74,49	1.348.979.530,00	(437.199.645,00)
Belanja Modal	7.588.963.100,00	5.263.916.000,00	69,30	24.597.872.626,42	(2.325.047.100,00)
PELAYANAN PUBLIK	438.184.953.638,00	406.392.709.579,50	92,74	366.954.044.281,75	(31.792.244.058,50)
Belanja Administrasi Umum	272.606.129.491,00	255.221.084.040,00	93,62	257.009.447.002,00	(17.382.045.442,00)
Belanja Pegawai/Personalia	243.249.846.101,00	232.569.478.477,00	95,61	235.474.299.137,00	(10.680.367.624,00)
Belanja Barang dan Jasa	27.698.525.890,00	21.006.737.131,00	75,84	20.329.702.080,00	(6.691.788.759,00)
Belanja Perjalanan Dinas	65.550.000,00	64.059.310,00	97,73	10.649.700,00	(1.490.690,00)
Belanja Pemeliharaan	1.592.207.500,00	1.583.809.131,00	99,47	1.130.796.085,00	(8.398.369,00)
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	42.256.140.263,00	39.277.079.163,00	92,95	27.982.260.431,75	(2.979.061.100,00)
Belanja Pegawai/Personalia	9.428.125.938,00	9.105.810.955,00	96,58	9.980.768.076,00	(322.314.983,00)
Belanja Barang dan Jasa	29.466.608.025,00	27.014.235.561,00	91,68	18.774.562.192,89	(2.452.372.464,00)
Belanja Perjalanan Dinas	841.730.000,00	739.138.292,00	87,81	850.745.770,00	(102.591.708,00)
Belanja Pemeliharaan	2.519.676.300,00	2.417.894.355,00	95,96	2.376.184.392,00	(101.781.945,00)
Belanja Modal	75.091.727.650,00	68.333.656.649,00	91,00	53.732.188.069,00	(6.758.071.001,00)
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	45.626.518.221,00	43.057.889.718,50	94,37	25.394.897.459,00	(2.568.628.502,50)
Belanja Tak Tersangka	2.604.438.013,00	500.000.000,00	19,20	2.835.251.320,00	(2.104.438.013,00)
Jumlah Belanja:	573.589.777.891,00	508.279.543.758,17	88,61	488.077.549.928,01	(65.310.234.132,83)
Surplus/(Defisit)	(88.998.861.488,00)	(12.269.331.104,87)	(13,79)	3.490.650.165,17	101.268.192.592,87
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Daerah	97.518.990.488,00	47.893.357.890,01	49,11	52.055.946.517,24	(52.088.357.397,99)
Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	45.430.633.090,01	45.430.633.090,01	100,00	50.401.982.367,24	0,00
Penerimaan Pinjaman	2.088.357.397,99	0,00	0,00	0,00	(52.088.357.397,99)
Penerimaan Piutang	0,00	2.462.724.800,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Penguatan Modal	0,00	0,00	0,00	1.653.964.110,00	0,00
Pengeluaran Daerah	8.520.129.000,00	60.162.688.994,88	706,12	55.546.596.882,41	51.642.559.994,88
Sisa Perhitungan Tahun Berkenaan	0,00	51.689.560.066,48	0,00	45.430.633.090,01	51.689.560.066,48
Penguatan Modal	4.900.000.000,00	4.853.000.000,00	99,04	0,00	(47.000.000,00)
Penyertaan Modal	3.482.384.000,00	3.482.384.000,00	100,00	5.764.670.664,00	0,00
Pembayaran Utang Pokok yg Jatuh Tempo	137.745.000,00	137.744.928,40	100,00	137.744.928,40	(71,60)
Piutang PSS	0,00	0,00	0,00	3.660.898.000,00	0,00
Piutang Sekretariat	0,00	0,00	0,00	552.650.000,00	0,00
Jumlah Pembiayaan:	83.998.861.488,00	(12.269.331.104,87)	(13,79)	(3.490.650.165,17)	(103.730.917.392,87)

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

LAPORAN REALISASI APBD SETELAH KONVERSI
 TAHUN ANGGARAN 2006
 (AUDITAN)

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI Rp	SELISIH Rp	%
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak daerah	32.750.000.000,00	37.979.313.374,32	5.229.313.374,32	115,97
Pendapatan Retribusi daerah	33.405.992.000,00	34.867.831.814,83	1.461.839.814,83	104,38
Pendapatan dr Kekayaan yg dipisah	3.372.204.050,00	5.048.288.039,65	1.676.083.989,65	149,70
Lain-Lain PAD yang Sah	6.264.124.280,00	12.814.661.866,60	6.550.537.606,60	204,57
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	75.792.320.330,00	90.710.095.117,40	14.917.774.787,40	119,68
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	35.500.000.000,00	49.208.735.240,00	13.708.735.240,00	138,62
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	302.636.208,00	302.636.208,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	485.397.000.000,00	485.397.000.000,00	0,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	25.800.000.000,00	25.850.000.000,00	60.000,00	100,23
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	546.697.000.000,00	560.768.371.448,00	14.071.371.448,00	338,85
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.800.000.000,00	49.531.420.688,89	17.731.420.688,89	155,76
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	1.919.693.500,00	1.919.693.500,00	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	31.800.000.000,00	51.451.114.188,89	19.651.114.188,89	161,80
Total Pendapatan Transfer	578.497.000.000,00	612.219.485.636,89	33.722.485.636,89	105,83
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	654.289.320.330,00	702.929.580.754,29	48.640.260.424,29	107,43
BELANJA				
ELANJA OPERASIONAL				
Belanja Pegawai	427.336.430.419,03	370.635.197.503,86	(56.701.232.915,14)	86,73
Belanja Barang	121.768.601.808,66	107.746.047.882,74	(14.022.553.924,92)	88,48
Bunga	143.619.653,94	143.619.653,94	0,00	100,00
Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sosial	37.037.050.200,00	34.050.335.606,00	(2.986.714.594,00)	91,94
Jumlah Belanja Operasional	586.285.702.081,60	512.575.200.647,54	(73.710.501.434,06)	87,43
ELANJA MODAL				
Belanja Tanah	8.254.062.500,00	2.320.424.802,00	(5.933.637.698,00)	28,11
Belanja Peralatan dan Mesin	17.520.046.250,00	12.150.118.637,00	(5.369.927.613,00)	69,35
Belanja Gedung dan Bangunan	60.423.574.390,00	50.609.104.970,01	(9.814.469.419,99)	83,76
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.599.040.550,00	14.310.185.299,00	(5.288.855.251,00)	73,01
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.267.063.850,00	1.032.733.500,00	(6.234.324.350,00)	14,21
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	113.063.787.540,00	80.422.573.298,01	(32.641.214.241,99)	71,13
ELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	3.748.417.382,00	(251.582.618,00)	93,71
Jumlah Belanja Tak terduga	4.000.000.000,00	3.748.417.382,00	(251.582.618,00)	93,71
Jumlah Belanja	703.349.489.621,60	596.746.191.327,55	(106.603.298.294,05)	84,84

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI Rp	SELISIH Rp	%
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	13.370.650.000,00	13.019.217.200,00	(351.432.800,00)	97,37
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	13.370.650.000,00	13.019.217.200,00	(351.432.800,00)	97,37
Jumlah Transfer	13.370.650.000,00	13.019.217.200,00	(351.432.800,00)	97,37
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	716.720.139.621,60	609.765.408.527,55	(106.954.731.094,05)	85,08
SURPLUS/DEFISIT	(62.430.819.291,60)	93.164.172.226,74	155.594.991.518,34	(149,23)
PEMBIAYAAN				
PIERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	51.589.560.066,48	51.691.306.850,48	1.746.784,00	100,00
Pinjaman Dalam Negeri	20.079.004.150,52	0,00	(20.079.004.150,52)	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	71.768.564.217,00	51.691.306.850,48	(20.077.257.366,52)	72,02
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00	100,00
Penggunaan Modal	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
Pembayaran Pokok Pinjaman ke Pemerintah Pusat	137.744.925,40	137.744.925,40	0,00	100,00
Jumlah Pengeluaran	9.337.744.925,40	9.337.744.925,40	0,00	100,00
PEMBIAYAAN NETO	62.430.819.291,60	42.353.561.925,08	(20.077.257.366,52)	67,84
LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN	(0,00)	135.517.734.151,82	135.517.734.151,82	

BUPATI SLEMAN,

IBNU SUBIYANTO

LAMPIRAN 1

PERATURAN DAERAH

NOMOR : 5 Tahun 2008

TANGGAL : 6 Oktober 2008

PEREMINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Setelah Konversi)
TAHUN ANGGARAN 2007
 (Auditan)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
			Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN:					
	Pendapatan Asli Daerah				
	Pendapatan Pajak Daerah	42.000.000.000,00	50.287.665.731,91	8.287.665.731,91	119,73
	Pendapatan Retribusi Daerah	39.299.207.160,00	40.965.623.630,57	1.666.420.870,57	104,24
	Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	5.634.323.740,00	5.732.297.630,18	97.973.890,18	101,74
	Lain-lain PAD yang Sah	7.962.915.820,00	23.670.957.28,34	15.708.041.508,34	297,26
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	94.896.446.720,00	120.656.548.721,00	25.760.102.001,00	127,15
	Pendapatan Transfer				
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
	Dana Bagi Hasil Pajak & Non Pajak	62.079.000.000,00	68.345.288.761,00	6.266.288.361,00	110,09
	Dana Alokasi Umum	543.065.000.000,00	543.065.000.000,00	0,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	10.151.000.000,00	10.151.000.000,00	0,00	100,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	100,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat untuk Pendidikan	0,00	5.613.532.600,00	5.613.532.600,00	0,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	623.295.000.000,00	635.174.820.961,00	11.879.820.961,00	102,24
	Transfer Pemerintah Provinsi				
	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	48.924.981.600,00	52.201.913.300,00	3.276.931.700,00	106,70
	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	8.600.000.000,00	12.799.500.000,00	4.199.500.000,00	148,83
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	57.524.981.600,00	65.001.413.300,00	7.476.431.700,00	113,00
	Total Pendapatan Transfer	680.819.981.600,00	700.176.234.261,00	19.356.252.661,00	103,15
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	Pendapatan Hibah	0,00	2.062.081.450,00	2.062.081.450,00	0,00
	Kompensasi Pajak Penghasilan	0,00	2.109.321.650,00	2.109.321.650,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	4.171.403.110,00	4.171.403.110,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	775.716.428.320,00	825.004.186.092,00	49.287.757.772,00	106,35
BELANJA					
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai/Personalia	533.823.068.952,22	468.668.465.025,00	(65.154.602.927,22)	87,79
	Belanja Barang	117.576.601.333,60	98.462.427.536,50	(19.114.173.797,10)	83,74
	Belanja Bunga	144.000.000,00	136.139.831,64	(7.409.168,36)	94,85
	Belanja Subsidi	7.750.204.585,00	7.743.887.439,00	(6.317.146,00)	99,92
	Belanja Bantuan Sosial	48.511.290.033,80	39.938.343.665,00	(8.572.946.168,80)	82,33
	Jumlah Belanja Operasional	707.805.164.904,62	614.949.715.697,14	(92.855.449.207,48)	86,88
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	28.551.406.400,00	12.219.081.813,00	(16.332.324.587,00)	42,80
	Belanja Peralatan dan Mesin	29.346.454.450,00	22.030.162.300,00	(7.316.292.150,00)	75,07
	Belanja Gedung dan Bangunan	60.326.995.979,00	50.763.440.656,86	(9.563.555.922,14)	84,15
	Belanja Jalan, Iriqasi, dan Jalinan	27.558.190.883,00	23.012.501.691,00	(4.545.689.192,00)	83,51
	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.450.725.150,00	1.535.004.540,12	(5.915.716.909,88)	20,60
	Jumlah Belanja Modal	153.233.772.862,00	109.560.194.100,98	(43.673.578.761,02)	71,50
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	7.933.301.990,00	0,00	(7.933.301.990,00)	0,00
	Jumlah Belanja tak Terduga	7.933.301.990,00	0,00	(7.933.301.990,00)	0,00
	JUMLAH BELANJA	868.972.239.756,62	724.509.909.798,12	(144.462.329.958,50)	83,38
	TRANSFER				
	Transfer Bagi Hasil ke Desa				
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	18.803.945.253,20	18.615.842.894,24	(188.102.358,96)	99,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	9.062.420.000,00	8.988.223.200,00	(74.196.800,00)	99,18
	JUMLAH TRANSFER	27.866.365.253,20	27.604.066.094,24	(262.299.158,96)	99,06
	Jumlah Belanja dan Transfer	896.838.605.009,82	752.113.975.892,36	(144.724.629.117,46)	83,86
	Surplus/(Defisit)	(121.122.176.689,82)	72.890.210.199,64	194.012.386.889,46	(60,18)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SELISIH	%
			Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN DAERAH						
	Penggunaan SILPA					
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	135.517.734.154,82	135.517.734.151,82		(3,00)	00,00
		0,00	1.50.823.200,00		1.750.823.200,00	0,00
	Jumlah	135.517.734.154,82	137.268.557.351,82		1.750.823.197,00	101,29
Pengeluaran Daerah						
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda					
	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah-Pemerintah Pusat	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00		0,00	100,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	138.000.000,00	137.744.928,40		(255.071,60)	99,82
	Restitusi Pajak	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00		0,00	100,00
		7.557.465,00	7.557.465,00		0,00	100,00
	Jumlah	14.395.557.465,00	14.395.301.393,40		(1.555.071,60)	99,99
	Pembiayaan Netto	121.122.176.689,82	122.873.254.958,42		1.751.078.268,60	101,45
	SILPA	0,00	195.763.465.159,06		(1.751.078.268,60)	



BUPATI SLEMAN,

IBNU SUFIYANTO